

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Konflik yang terjadi di Timur-Tengah dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Konflik Intra Arab dan Konflik Arab vs Non-Arab. Untuk konflik pertama (Intra Arab), konflik ini lebih kepada dua faktor yang bertentangan yang terjadi pada tubuh arab sendiri seperti dari dimensi religio-ideologis (Lebanon), dari dimensi politiko-strategis (kelompok “modarat” vs Kelompok “radikal”), serta konflik yang didasari oleh sosial-ekonomi yang bersumber dari jurang pemisah antara kaya-miskin (konflik Irak-Kwait). Sedangkan untuk konflik Arab vs Non-Arab (seperti Irak-Iran, Irak-Suku Kurdi, Israel-Palestina), dan konflik ini bisa ditemui di semua dimensi. Dan yang menarik dari persoalan ini adalah Arab hampir tidak berhasil mengalahkan pihak non arab, khususnya pada kasus Israel-Palestina ini dari sini dapat dilihat bahwa kelemahan dari tubuh arab itu sendiri adalah sulitnya menggalang persatuan umat muslim itu sendiri.

Keterlibatan AS dalam upaya perdamaian Israel-Palestina dalam perundingan kedua Negara tersebut dari awal KTT Camp David I (1978) hingga KTT Camp David II (2000). Masa jeda peredaman konflik dan optimisme perdamaian akhir tahun 2000 mengalami stagnasi lagi. Dalam pelaksanaannya, Israel cenderung menarik waktu dalam merealisasikan komitmen perjanjian yang ada. Kegagalan KTT Camp David II dan meletupnya intifadah Al-Aqsa sejak 28 september 2000.

Situasi Camp David I memang berbeda dengan Camp David II. Misi Presiden

Camp David I lebih dikatakan jauh lebih mudah lantaran Presiden Anwar

Sadat dan PM Manachem Begin sudah lebih dahulu menjembatani hamper 90% isu yang menjadi perbedaan pendapat saat itu.

Disamping itu, PM Begin merupakan perdana menteri yang kuat dengan pemerintah yang utuh. Berbeda dengan PM Barak saat ini yang tampil lemah dengan pemerintah yang rapuh dan amburadul. Meski demikian, Presiden Sadat dan PM Begin butuh tinggal selama 13 hari di Camp David untuk menyelesaikan sisa masalah waktu itu.

## **B. LATAR BELAKANG MASALAH**

<sup>1</sup>Dalam perjalanannya (Palestina) menuju kearah penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah, segala cara telah ditempuh antara kedua belah pihak (Israel-Palestina) namun sampai saat ini pun masih belum terlalu jauh menemukan penyelesaian / kesepakatan yang biasa dikatakan “memuaskan”. Baik itu dipihak Palestina ataupun di pihak Israel.

Teologi merupakan penyulut dari konflik di tanah Al Quds (Kota Jerussalem), yang di klim sebagai kota suci mereka masing-masing. Hal ini dikarenakan di tempat tersebut terdapat tiga pusat ajaran agama besar (Islam, Kristen, serta Yahudi) sehingga tempat tersebut banyak dikunjungi umat beragama dari berbagai pelosok Negeri.

Dalam konflik yang berkepanjangan tersebut banyak pihak-pihak/Negara-negara yang peduli ikut ambil bagian dalam konflik ini (Israel-Palestina) demi terciptanya kedamaian dan keamanan disana. Segala cara dan perundingan telah di lakukan agar terhindarnya pertumpahan darah lagi di tanah Al Quds tersebut-dalam satu dekade terakhir-seperti Konfrensi Madrid tahun 1991, Kesepakatan Oslo 1993, Kesepakatan

---

<sup>1</sup> [Http : // www. Infopalestina.com/statistic,17/09/07](http://www.infopalestina.com/statistic,17/09/07)

[Http : // www. Us-israel.org/jsource/politics/basiclawjerusalem.htm,17/09/07](http://www.us-israel.org/jsource/politics/basiclawjerusalem.htm,17/09/07)

Chalab Muhammad Mubrin. *Dalastina : Sejarah Perkembangan dan Konstitusi Iskarta : Camp Jassari*

Cairo tahun 1994, Kesepakatan Taba 1995, Kesepakatan Hebron tahun 1997, Kesepakatan Wye River tahun 1998, dan Kesepakatan Sharm AL Sheikh tahun 1999, dan di babak millennium baru Konfrensi Damai Timur Tengah Camp David II yang dipelopori kembali oleh Amerika Serikat yang saat itu dipimpin Presiden Bill Clinton yang di gelar pada tanggal 11 Juli 2000 di tempat yang sama. (sebelumnya Camp David I pada tahun 1978 yang dipelopori Presiden Amerika Jimmy Carter) yang mengalami kegagalan dan berdampak terhadap meletusnya Intifadah kedua yang dikenal dengan *Intifadah Al Aqsa* pada 28 September 2000.

Terlebih lagi dalam perkembangan proses perdamaian di Palestina tersebut, semua tidak dapat terlepas dari campur tangan Amerika Serikat (sebagai Negara yang memiliki pengaruh besar), dimana dalam perundingan-perundingan mengenai konflik di Palestina ini Amerika selalu menjadi penengah dan bahkan sebagai negara yang selalu menawarkan draft-draft perdamaian disana.

Yang menjadi pertanyaan disini, apakah semua itu (perundingan-perundingan yang dipelopori oleh Amerika) terlepas dari unsur *persaudaraan* yang mengandung unsur dikte, konspirasi, atau adanya unsure manipulasi sejarah terhadap proses perdamaian di tanah Palestina tersebut. Yang kita sebut sebagai *Tanah Tiga Tuhan* karena perdamaian yang sulit sekali dicapai dari kedua belah pihak (Israel-Palestina).

Oleh sebab itu, banyak sekali dugaan-dugaan dari berbagai kalangan yang mengatakan perdamaian disana tidak lepas dari skenario Amerika yang membela Israel dan menginginkan konflik tetap ada disana, Amerika yang pandai memutar balikan fakta (dibantu dengan semua *sumber dayanya*), ditambah lagi dengan *lobi-lobi Israel* yang terkenal sulit di kalahkan. Maka Amerika pun menciptakan imajinasi bahwa semua ini

(konflik serta kekerasan disana adalah disebabkan oleh Islam, baik itu fundamentalisme, terorisme, sampai ke jihad).

Memang, pasca KTT Camp David II Negara-negara Internasional masih mengupayakan terciptanya perdamaian di tanah Palestina itu. Baik dari Negara-negara Islam maupun Amerika yang juga ikut ambil bagian. Negara-negara Internasional yang terlibat langsung proses perdamaian Timur-Tengah tidak tinggal diam. Mereka tahu konsekuensi dari kegagalan perundingan tersebut yang akan berimbas pada perdamaian di tanah Palestina kelak (Intifadah Al Aqsa contohnya).

Seperti Negara-negara Arab yang tergabung dalam Komite Jerusalem (*Al Quds*) Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan 16 negara Islam-termasuk Indonesia-hari senin 28 Agustus 2000 di Maroko menggelar sidang putaran ke-18 membahas masalah status kota Jerussalem. Yang kemudian akan dilanjutkan di Doha pada November 2000.

Banyak kalangan beranggapan bahwa proses damai di Palestina tersebut akan sulit di capai, selama pihak-pihak yang bertikai terus mengklaim hak-hak mereka terhadap tanah Jerusalem tersebut. Memang kesulitan yang utama dihadapi dari perundingan-perundingan tersebut menemui jalan buntu pada saat permasalahan sudah menyangkut teologi, status ataupun hak tanah Jerussalem. Perundingan-perundingan tersebut hanya merupakan sebatas media atau sarana menuju perdamaian yang di kehendaki, namun itu semua kembali kepada pihak-pihak yang bertikai.

Sesungguhnya berita kegagalan KTT Camp David II hari selasa 25 Juli 2000, bukan suatu hal yang mengejutkan. Bahkan menjelang KTT itu sendiri, hamper semua

yang paling mungkin terjadi. Pasalnya, Israel dan Palestina sejak awal sudah berbeda secara mendalam dalam filosofi dan ideology menyangkut isu-isu status final yang pada gilirannya mempengaruhi pada cara pandang menyelesaikan isu tersebut.

Dalam draft perdamaian tersebut, Ehud barak mempertahankan status quo di jalur Gaza dan Tepi Barat yang dikemas dalam bungkus kebijakan lima garis merah yang terkenal itu. Intinya adalah Ibu Kota Jerussalem yang bersatu dan abadi, Pemukiman Yahudi dibawah kedaulatan Israel, tidak ada militer di Tepi Barat, tidak mengakui hak pulang bangsa Palestina, dan tidak kembali pada perbatasan tahun 1967. sementara Amerika secara implicit mendukung kebijakan PM Barak tersebut.

Sebaliknya Yasser Arafat berjuang mengembalikan hak-hak rakyat Palestina dengan menggunakan senjata resolusi PBB, semacam Resolusi No.242, No.338, dan No.194. Tak pelak lagi, terjadilah benturan keras Israel dan Palestina di arena perundingan, mengingat kontradiksi antara resolusi PBB dan garis merah versi Ehud Barak tersebut. KTT Camp David II selama 15 hari itu ternyata tidak mampu melenturkan jarak kontradiksi tersebut.

Kegagalan dari perundingan Camp David II membuat kecewa beberapa kalangan yang telah mendukung untuk terciptnya perdamaian kedua Negara tersebut<sup>2</sup>. Karena itu, yang disadari oleh semua pihak, Barak dan Arafat harus berhasil mencapai kesepakatan final atas semua isu tanpa kecuali dalam waktu yang singkat ini. Karena kalau pemahaman itu yang dianut, maka KTT itu sendiri merupakan problema yang lebih besar dari problema yang ada sebelumnya.

Rasanya, model KTT Geneva antara Presiden AS Bill Clinton dan Alm. Presiden Suriah Hafez Assad bulan maret 2000 yang gagal itu merupakan contoh yang dapat

---

<sup>2</sup> Bahman Mustakafa Abdul "Isiah Isiah Israh Palestina" Jakarta: Kompas, 2002, 1

dilihat serupa atas KTT Camp David II sekarang. Artinya kegagalan KTT Camp David II bukan segala-galanya, karena KTT itu hanya bagian dari usaha terus menerus dalam menggerakkan proses perdamaian Timur Tengah.

Kendala utama KTT Camp David itu terletak pada isu Kota Jerussalem, khususnya Kota Lama yang hanya memiliki satu kilometer persegi tetapi memiliki tempat suci bagi tiap agama samawi, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Dan, untuk pertama kalinya sejak tahun 1967, Israel dan Palestina terlibat konflik terbuka di meja perundingan soal kota suci tersebut. Palestina memegang teguh hak hukum, histories dan demografis di Jerusalem Timur. Sedangkan Israel mengandalkan kekuatan di lapangan. Inisiatif kompromi yang diajukan AS menyangkut kota suci itu ternyata tidak jauh dari sikap Israel, yaitu hanya memberi Palestina otonomi luas di Jerussalem Timur dan semacam kedaulatan agama di tempat suci agama Kristen dan Islam di Old City. Sedang kedaulatan politik, tetap di pegang Israel. Inisiatif tersebut ditolak mentah-mentah oleh Yasser Arafat, di mana Palestina tetap menuntut kedaulatan penuh di Jerussalem Timur.

Bagi Clinton, gagalnya KTT Camp David adalah hilangnya momentum sejarah untuk membuat prestasi besar, sebelum ia meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2001. Bagi Barak KTT itu merupakan inisiatifnya. Adalah Barak yang paling getol meminta agar KTT segera digelar, sehingga ia berani mengorbankan keutuhan koalisi pemerintahannya demi KTT itu (setelah mundurnya Partai Nasional Agama, Yisrael

DAFTAR PUSTAKA  
1. David Mervin, *Perundingan Camp David*

Karena itu, ketika KTT Camp David dinyatakan gagal mencapai kesepakatan pelh Presiden Clinton, segera diisyaratkan pula akan digelar KTT lanjutan dalam waktu yang akan ditentukan kemudian. Menlu Albright dan utusan khusus AS Dennis Ross akan mengunjungi Timur Tengah lagi beberapa pekan mendatang untuk membahas KTT lanjutan itu. Alhasil, Presiden Clinton dan PM Barak tampak lebih berkepentingan dengan KTT saat ini daripada Yasser Arafat.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka topik permasalahan yang akan dicoba dianalisa dalam penelitian ini adalah mengenai:

**“Mengapa Upaya Perundingan Camp David II (2000) gagal mencapai Kesepakatan Final konflik Israel Palestina”**

### **D. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN .**

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang kita hadapi dalam Hubungan Internasional diperlukan teori yang relevan atau teori yang berhubungan dengan suatu permasalahan tersebut. Pada penelitian ini, penulis mengacu pada suatu teori yaitu Teori



## Teori Negosiasi

<sup>3</sup> Didalam suatu persetujuan Israel Palestina, telah diupayakan berbagai jalan perundingan untuk mencapai perdamaian termasuk dalam perundingan tersebut adalah Camp David II. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi demi tercapainya suatu negosiasi, seperti yang telah diterjemahkan sebagai berikut:

*“ Harus ada dua elemen didalam negosiasi: harus ada persamaan kepentingan dan isu-isu konflik. Tanpa kesamaan kepentingan tidak ada yang dinegosiasikan, tanpa isu-isu konflik juga tidak ada yang dinegosiasikan ”.*

Diakui secara luas bahwa salah satu fungsi utama diplomasi adalah negosiasi. Berbagai upaya perdamaian melalui perundingan-perundingan telah di gelar salah satunya perundingan Camp David II, namun perdamaian masih juga belum terwujud. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak tercapainya suatu negosiasi dalam perundingan tersebut. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai mencari cara untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik mereka. Sedangkan Herbert C. Kelman mengatakan bahwa keberhasilan suatu perundingan (*negosiasi*) akan dipengaruhi oleh beberapa factor.

---

<sup>3</sup> Fred C. Ikle “Negotiation” dalam Craig dan George, *Introduction to International Politics*, Prentice Hall, 1980, Hal.57

S.L. Roy, *Diplomasi*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 17

H. Miall, O Ramsbotham, dan T. Woodhouse, *Resolusi Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, Mencegah, Mencegah dan Mengakhiri Konflik*. Ransumbar Politik Sosial, Agama dan Pas. teri Tri Budhi Satrio, Jakarta



<sup>4</sup>*Pertama* prinsip dan pragmatis (*Principle and Pragmatism*), artinya sebelum memasuki perundingan, pihak-pihak yang berunding harus telah sepakat terlebih dahulu mengenai hal-hal prinsip yang menjadi sengketa. Untuk mencapai kesepakatan maka diperlukan komitmen dan tanggung jawab moral untuk saling menerima dan memberi prinsip-prinsip yang mereka sengketa secara timbal balik. Inti dari komitmen ini berkaitan dengan dimensi moral dari pihak-pihak yang bersengketa untuk bersedia berunding dan mentaati hasil perundingan. Sebelum ada kesepakatan maka belum terdapat momentum yang tepat bagi kedua belah pihak melakukan perundingan.

Sedangkan pragmatisme sebagai prasyarat tercapainya perdamaian, atau menurut Kelman “ *Pragmatism is a sine qua non for a mutually acceptable peace*”, artinya perundingan ini harus pragmatis atau mudah untuk dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga terwujud suatu perdamaian.

Terdapat tiga tipe pragmatisme yang akan memegang peranan dalam proses perundingan perdamaian. *Pertama*, adanya keterpaksaan tekanan (*Compulsion*) yang membuat pihak yang bersengketa bersedia berunding. Kondisi ini dapat menciptakan momentum yang tepat untuk melakukan perundingan.

*Kedua*, pragmatisme yang dilandasi adanya jaminan masa depan yang lebih baik (*Vision of Future*), yang artinya suatu perundingan dianggap pragmatis apabila

---

<sup>4</sup> Siti Mutiah, “Hambatan Pelaksanaan Deklarasi Prinsip-prinsip sebagai Resolusi Konflik Palestina-”

memenuhi adanya jaminan masa depan yang lebih baik lagi bagi kedua belah pihak dalam masa datang meskipun mereka harus lebih dahulu mengorbankan sesuatu.

*Ketiga*, pragmatisme dilandasi adanya kepentingan (*interest*) yang berarti bahwa suatu perundingan akan bisa sukses dan mudah diimplementasikan, apabila masing-masing pihak sama-sama memiliki suatu kepentingan untuk memecah status quo yang menghalangi karena keadaan status quo berdampak membahayakan kedua pihak sehingga perlu dirubah, walaupun factor kepentingan sebagai syarat akan keberhasilan sebuah perundingan, tetapi terkadang bisa juga menjadi penghambat perundingan karena terbentur oleh perbedaan kepentingan yang mendasar.

Keberhasilan suatu perundingan harus adanya komitmen untuk saling mengakui eksistensi masing-masing (*acknowledgment*). Pengakuan eksistensi kebangsaan atau Negara masing-masing akan dapat menjembatani hal-hal yang tidak pasti diluar inti yang menjadi sengketa mereka. Untuk itu syarat pengakuan tersebut haruslah timbal balik (*reciprocal*). Artinya kedua belah pihak ini mempunyai komitmen untuk saling mengakui, berkaitan masalah prinsip yang mereka sengkatakan.

Berdasarkan teori diatas, yang dilakukan Israel dan Palestina dalam menentukan nasib negaranya melalui Negosiasi. Hal ini bedasarkan pada kebanyakan peristiwa atau momentum yang ada diselesaikan melalui jalan suatu perundingan perdamaian. Karena suatu pertentangan atau konflik lebih banyak berakhir di suatu negosiasi perjanjian atau perundingan perdamaian yang bersama

## **E. TUJUAN PENELITIAN**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk memberi gambaran yang obyektif tentang beberapa formula perdamaian yang telah dilakukan kedua belah pihak yaitu Israel-Palestina.
2. Untuk memberi gambaran tentang proses perdamaian kedua Negara tersebut dengan menggunakan Perundingan Camp David II dan mengapa mengalami kegagalan.
3. Sebagai syarat untuk memenuhi gelar keserjanaan S-1 pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **F. HIPOTESA**

Berdasarkan dari penjabaran permasalahan diatas, maka penulis merumuskan bahwa upaya perundingan Camp David II gagal direalisasikan atau diwujudkan karena:

1. Adanya kepincangan dalam upaya perundingan Camp David II yang lebih memihak kepada Israel
2. Tidak adanya jaminan masa depan yang lebih baik kepada rakyat Palestina yang menyebabkan gagalnya upaya perundingan tersebut

## **G. TEHNIK PENGUMPULAN DATA**

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan fenomena dan peristiwa yang diketahui melalui data dari studi pustaka. Data diolah melalui atau bersumber dari literature-literatur, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, majalah-majalah, surat kabar, dan multimedia.

## **H. JANGKAUAN PENELITIAN**

Wilayah kajian skripsi ini secara umum merupakan analisa yang menggambarkan peristiwa diplomasi yang terjadi dari perkembangan yang ada selama ini mengenai konflik Israel Palestina dan difokuskan pada suatu perundingan Camp David II yang merupakan suatu perundingan yang terjadi pada tahun 2000 dan dimana perundingan tersebut tidak membuahkan hasil yang lebih baik terhadap kedua Negara tersebut atau bisa dikatakan gagal dan setelah perundingan tersebut tidak ada lagi formula perdamaian yang telah dilakukan oleh kedua Negara tersebut hingga tahun ini yang menyebabkan adanya ketidakpastian tentang kapan berakhirnya perang tersebut. Cakupan pembahasan dan pengambilan data difokuskan pada formula perdamaian yang telah dicapai oleh kedua Negara tersebut yaitu Israel Palestina khususnya pada perjanjian Camp David II (2000) yang tidak berhasil menyelesaikan konflik tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan mengambil diluar decade tersebut, sepanjang dianggap penting dan relevan

## **BAB II**

### **Dinamika Sejarah Konflik Berkepanjangan di Israel-Palestina**

#### **A. Sejarah Konflik Israel Palestina**

Konflik Israel Palestina yang sudah berlangsung sejak 1948, dan menjadi “induk” dari permasalahan di kawasan Timur Tengah. Konflik Israel-Palestina tampaknya masih akan terus berlanjut, bahkan dikhawatirkan akan terjadi eskalasi konflik akibat keengganan Israel dibawah kepemimpinan tokoh garis keras Ariel Sharon (dari partai Likud) untuk menaati setiap perjanjian yang sudah disepakati. AS pun sebagai “promotor” terutama pada proses perdamaian Israel-Palestina ternyata gagal untuk memaksa penguasa Israel untuk tunduk pada hukum internasional.

Situasi ini menjadi bertambah eksplosif dengan makin tidak jelasnya pembentukan Negara Palestina merdeka. Pasalnya, rencana pembentukan Negara Palestina ini ditentang keras oleh Israel yang didukung AS Negara yang selalu mengklaim menganut system demokrasi dan menjunjung hak-hak manusia (HAM). Namun justru menolak hak-hak asasi bangsa Palestina untuk memiliki sebuah Negara yang merdeka.

Meninggalnya presiden otoritas Palestina Yasser Arafat pada 11 November 2004., yang selama ini dikenal sebagai seorang politisi yang handal, tampaknya akan semakin mempersulit penyelesaian masalah Palestina. Masalah Palestina memang menjadi “induk” dari problema kawasan Timur Tengah”. Sampai saat ini memang belum ada kecapatan diantara para ahli Hubungan Internasional maupun studi kewilayahan

perihal apa dan dimana persisnya yang disebut sebagai kawasan “Timur Tengah” (*Middle East*) yang kadangkala juga disebut sebagai “*Near East*” (Timur Dekat).

<sup>1</sup>Sekurang-kurangnya ada tiga pendapat. Pertama, yang mendefinisikan Timur Tengah sebagai Negara-negara non-Afrika ditambah Iran dan Israel. Artinya, Libya, Aljazair, Maroko, Mauritania ( dan Negara-negara Arab lain yang berada di kawasan Afrika Utara), serta Turki, tidak termasuk dalam kategori Timur Tengah. Pemahaman seperti ini, misalnya dianut oleh David E. Long dan Bernard Reich. Kedua, yang mengartikan Timur Tengah sebagai kawasan yang mencakup seluruh Negara dengan latar belakang budaya Arab atau semua Negara yang tergabung dalam Liga Arab ditambah dengan Iran, Turki dan Israel.

Pandangan ini diantara lain dianut oleh Roy R. Anderson, Robert F. Seibert dan Jon G Wagner serta Robert O. Freedman. Pandangan ketiga adalah yang memasukan Negara-negara seperti pandangan kedua, ditambah dengan Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan republic-republik Asia Tengah bekas Uni Soviet, ke dalam “kawasan Timur Tengah”.

Terlepas dari pandangan mana yang benar, yang jelas masyarakat internasional terlanjur sudah mengidentikan Timur Tengah sebagai kawasan rawan konflik. Dalam beberapa decade terakhir ini, paling tidak sejak 1948 (saat terbentuknya Negara Israel yang “dicangkokkan” oleh dunia Barat di tengah Dunia Arab), pemberitaan masalah Timur Tengah hampir tidak pernah lepas dari tiga hal, yaitu: “*darah, minyak, dan senjata*.”

---

<sup>1</sup> <http://www.InfoPalestina.com/viewall.asp?id=285,03/09/07>

Selain itu sejak bangsa Yahudi memasuki Palestina, konflik keduanya beralangsung terus menerus. Kekalahan mendasar dialami Palestina ketika Israel memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948. Namun sebelum Israel<sup>2</sup> memproklamkan kemerdekaannya, PBB pernah menengahi konflik keduanya dengan mengeluarkan Resolusi no. 181 pada tanggal 29 November tahun 1947 yang menegaskan bahwa tanah Palestina akan dibagi menjadi Negara Arab dan Yahudi. Resolusi PBB no 181 tahun 1947 dan deklarasi Negara Yahudi tahun 1948 itu, membawa petaka di Timur Tengah yang terus berlanjut hingga saat ini. Negara-negara Arab saat itu memilih perang daripada menerima resolusi tersebut dan Negara Yahudi.

Resolusi PBB tersebut, tidak mendapat sambutan yang baik dari keduanya. Bahkan telah menjadikan perang terbuka. Namun yang paling mengesankan dalam peperangan kedua Bangsa tersebut itu adalah orientasi yang berbeda. Pada peperangan tersebut, bangsa Palestina berperang dengan Yahudi karena ingin mempertahankan tanah leluhur bangsa mereka sendiri. Israel berperang untuk membumihanguskan orang-orang Palestina yang notabennya tidak senang akan kehadiran bangsa Yahudi baru.

Dengan melihat sejarah masa lampau, sebenarnya bangsa Arab merasa lebih mempunyai cukup bukti dan alasan yang lebih kuat ketimbang orang-orang Yahudi yang mendasarkan klaimnya atas tanah Palestina hanya berdasarkan pada alasan historis "Tanah yang Dijanjikan Tuhan". Seorang pemimpin politik Arab mengatakan bahwa, bahkan dengan latar kitab suci sekalipun, tidak ada orang yang bisa menjawab pertanyaan atas klaim terhadap tanah yang telah mereka tinggalkan selama hampir 2000 tahun yang lalu.

---

<sup>2</sup> [www.Cnn.com/](http://www.Cnn.com/) "The Crisis Of Palestina" 24/10/27



<sup>3</sup>Inti dari akar dilemma Israel sesungguhnya terletak pada salah satu dari dua realitas yang sangat sulit, yakni meninggalkan identitas Israel yang bertumpu pada zionisme karena adanya realitas-realitas internal baru balik dikalangan warga Yahudi dan Israel sendiri maupun di lingkungan bangsa Palestina, atau memenuhi tuntutan bagi pengakuan kemerdekaan bangsa Palestina. Dihadapkan dengan salah satu pilihan yang kedua-duanya ibarat buah simalaksana, masyarakat Yahudi dan Negara-negara Israel menghadapi krisis-krisis social, politik, dan keagamaan yang luar biasa sulit. Memakan buah simalaksana pertama berarti meninggalkan eksistensi Israel itu sendiri. Sementara mengambil buah simalaksana kedua berarti menempuh jalan perdamaian yang mengarah kepada pembentukan Negara Palestina.

Bagi bangsa Yahudi berkembang kecemasan yang kian meninggi ketika menyaksikan semakin lebarnya jurang diantara cita-cita ideology zionisme dengan realitas yang mereka hadapi dalam konfrontasi dengan Negara Palestina dan bangsa Arab umumnya. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan luar biasa yang menjadi pendorong kemunculan Negara Israel di Negara Palestina adalah ideology zionisme. Konflik tersebut sesungguhnya berpangkal dari kekalahan kerajaan Turki atas tentara Inggris dan sekutunya, sehingga mengakibatkan jatuhnya tanah Palestina kekuasaan mandate Inggris. Sejak dikuasai Inggris itulah orang-orang Yahudi dari penjuru dunia berdatangan ke tanah Palestina.

Bangsa Yahudi beranggapan bahwa tanah Palestina adalah tanah airnya. Tuntutan bangsa Yahudi tersebut didasarkan atas pemikiran dua alasan yakni, pertama

---

<sup>3</sup> Musthofa Abd. Rahman "Dilema Israel Antara Keinginan Politik dan Perdamaian" hal. 100

<sup>4</sup>berdasarkan prediksi (ramalan) nabi bagi reprivasi sisa-sisa kaum Yahudi dari pengasingan Babyonia. Kedua janji tuhan kepada nabi Ibrahim sebagaimana disebutkan dalam alkitab. Ketiga, hak sejarah berdasarkan pada tegaknya kerajaan Israel di Palestina kurang lebih dari dua ratus tahun yang lampau. Terakhir, adanya keyakinan bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan Tuhan. Sedangkan menurut bangsa Arab, sejak zaman purba tanah Arab adalah tanah air bangsa filistin, dan orang-orang arab sejak awal tidak hanya sebagai bangsa pendatang, baik itu yang dipimpin oleh Ibrahim pada tahun 2000 SM, maupun kedatangan mereka pada abad 21 SM dari mesir yang dipimpin oleh Musa. Sedangkan kedatangan mereka pada tahun 1917, tidak lebih sebagai bangsa perebut.

Bangsa Arab dan Yahudi, masing-masing bersikeras untuk menguasai tanah Palestina. Maka konflik akan keduanya tak terhindarkan lagi. Sehingga pada tahun 1948 terjadilah perang Arab-Israel yang berakibat seperempat juta rakyat Palestina terusir dari kampung halamannya. Selang beberapa hari, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan bersenjata untuk mengakhiri perang tersebut. Negara-negara Arab bisa menerima usulan gencatan senjata tersebut dengan syarat PBB harus mencegah imigrasi bangsa Yahudi dan pengiriman persenjataan perang bagi Israel.

Pada saat sebelum resolusi dijalankan kemenangan hampir berda di pihak Arab, akan tetapi karena tekanan diplomatic dan politik dari Inggris dan Amerika Serikat terhadap Negara-negara Arab, akhirnya pihak Arab melaksanakan resolusi gencatan senjata yang mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 1948.

Masa gencatan senjata ternyata dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Yahudi. Dengan bantuan organisasi Yahudi, terutama yang berada di Amerika Serikat, maka Israel

---

<sup>4</sup>M. Amien Rais, *Politik dan Demokratisasi Timur Tengah*, Pusat antar Universitas, Universitas Gadjah

berhasil membeli dan memasukkan persenjataan dalam jumlah besar-besaran berikut pesawat tempur, pesawat pembom dan tank-tank begitu pula sukarelawan pemuda Yahudi yang siap tempur. Akan tetapi sebaliknya dengan pihak Arab, masa gencatan senjata itu telah meningkatkan rasa curiga antar pemimpin Arab, yang secara diam-diam menginginkan wilayah pemerintahan Palestina dibawah kekuasaan mereka.

Dengan kekuatan yang disusun pada masa gencatan senjata, maka Israel telah berhasil mendesak Mesir yang pada waktu itu merupakan Negara yang terkuat, sementara itu Negara-negara Arab lainnya tidak memberikan bantuan yang berarti, ditambah tekanan dari Inggris dan Perancis terhadap Mesir, sehingga Mesir setuju melakukan perundingan dengan Israel. Pada tahun 1949, Yordania juga melakukan perundingan tersendiri dengan Israel, dan dalam perundingan tersebut telah dicapai kesepakatan tentang pembagian wilayah dengan Israel. Dalam pembagian tersebut, Yordania mendapatkan pembagian Tepi Barat dan Yerusalem, sedangkan Israel mendapat wilayah sesuai dengan resolusi pembagian 1947. dan dalam waktu bersamaan Mesir mendapatkan Jalur Gaza.

### ***1. Sejarah Negara Palestina***

Pertikaian antara Israel dan bangsa-bangsa Arab-Palestina adalah bermula dari perebutan klaim mengenai pemilikan tanah Palestina, yang kini diduduki oleh Israel. Baik Israel maupun Palestina merasa berhak atas daerah tersebut. Fakta sejarah and klaim berdasarkan sejarah menjadi dasar perdebatan kedua bangsa bertikai tersebut.

Sekitar 300 tahun sebelum masehi apa yang sekarang disebut tanah Palestina, pada awalnya disebut sebagai tanah Kana'an. Disebut dengan tanah Kana'an karena bertahun-tahun dihuni oleh suku Kana'an, suku Kana'an adalah suku yang paling domina

diduga berasal dari pulau kreta, di Laut Tengah. Bangsa-bangsa laut tersebut terdiri dari suku Filistin, Edom, Moab, dan suku Ammon.

<sup>5</sup>Suku Filistin segera bermukim di wilayah Pantai Barat Daya Kana'an yang kini dikenal sebagai Jalur Gaza. Karena wilayah Pantai dikuasai oleh Suku Filistin maka kemudian di hari para penguasa Yunani menyebut seluruh tanah dibelakangnya sebagai Palestina. Yang merupakan Lafaz dari bahasa Yunani "Pleshet" (tanah suku filistin). Sebutan itu juga dipakai untuk penguasa Romawi yang menggantikan bangsa Yunani bahkan dihidupkan kembali setelah Perang Dunia I guna menyebut wilayah bekas Kana'an hingga sekarang.

Perjalan suku Filistin di tanah Kana'an tidak pernah berjalan mulus. Wilayah Kana'an silih berganti jatuh ke tangan kaum penjajah. Wilayah tersebut pernah dikuasai Suriah, Babylonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Turki dan Inggris. Penjajahan itu akhirnya membuat Kana'an hanya memiliki sebuah identitas dari bangsa lain.

Pecahnya perang Arab-Israel 1948-1949 telah membawa kekalahan bagi penduduk Arab-Palestina. Rakyat Palestina menolak resolusi partisi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 29 November 1947, yang berisikan pembagian Negara Palestina menjadi Negara Arab dan Negara Yahudi dan Yerusalem dalam pengawasan Internasional. Akibat kekalahan tersebut, rakyat Palestina tidak hanya gagal mencapai kemerdekaan dan mendirikan Negara, tetapi juga kehilangan wilayah dan terpecah dalam beberapa kelompok dan tersebar di banyak Negara.

Pasca perang Arab-Israel pertama tahun 1948, banyak wilayah Arab diduduki Yahudi hingga territorial Arab menyempit hanya terbatas di Tepi Barat dan Jalur Gaza

---

<sup>5</sup> Harwanto Dahlan, *Politik dan Pemerintahan Timur Tengah*, Diktat kuliah Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik IDIV 1006 hal 96



mendiami wilayah sekitar kota Ramallah dan Jenin. Sedangkan Armenia banyak berdomisili di Jerussalem Timur.

Ekonomi penduduk Jalur Gaza dan Tepi Barat hingga kini masih bergantung pada Israel. Mata uang yang digunakan adalah mata uang Sikel, mata uang Israel. Sebagian penduduk Jalur Gaza dan Tepi Barat mencari nafkah dengan bekerja di Israel. Sebagian mereka bekerja di sector konstruksi bangunan. Meskipun demikian angka pengangguran masih sangat tinggi, mencapai angka 40%.

## **2. Sejarah Negara Israel**

Pada awalnya Israel adalah sekelompok imigran dari wilayah Mesopotamia yang memasuki wilayah Kana'an (Tanah Palestina) antara tahun 1900-1700 SM. Di Kana'an, para imigran itu kemudian dikenal sebagai kelompok ivrim (Hibrani) yang artinya "Keturunan Ever", nenek moyang Ibrahim. Dengan latar belakang yang tidak diketahui, kaum ivrim kemudian menyebut diri mereka Israel, yang artinya kurang lebih adalah dia yang sudah bergelut melawan tuhan.

Menurut keyakinan orang Yahudi, Musa diutus Tuhan untuk membawa kembali Bani Israel ke tanah yang dijanjikan dan diberkati Tuhan (*The Promised Land*). Tanah itu pada mulanya tidak diberitahukan tempatnya. Tetapi sesudah Musa membawa bangsanya mengembara sekitar 40 tahun di kawasan Gurun Sinai, akhirnya sampailah mereka pada suatu Tepi Sungai (Jordan), yang didepanya terpampang suatu Tanah yang indah dan subur, itulah tanah Kana'an (Tanah Palestina), yang mereka yakini sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan (*The Promised Land*). Tetapi diatas tanah itu sudah ada penghuni yang sudah bermukim berabad-abad disitu, yaitu bangsa Kana'an dan Filistin (Palestina). Musa mengatakan bahwa atas nama tuhan, maka tanah itu harus direbut selanjutnya mereka







Gereja itu diyakini tempat Yesus di salib. Sedangkan di sisi barat daya merupakan kawasan bagi penganut Kristen Ortodoks Armenia, sebuah aliran yang berbeda dari Katholik Rome.

Baik Israel maupun Palestina, sama-sama menginginkan kota Yerusalem sebagai ibukota negaranya. Alasan itu sering menjadi pemicu terjadinya bentrokan antara warga Palestina dan Israel. Masing-masing mengklaim bahwa Yerusalem berada di dalam wilayah masing-masing, dan di Yerusalem timur ada sekitar 231 pemukiman penduduk Israel. Pada dasarnya wilayah Israel dikelilingi oleh wilayah Mesir (225 km), Jalur Gaza (51 km), Jordan (238 km), Lebanon (79 km), Syria (76 km), West Bank (307 km). Daerah-daerah Israel meliputi Nejev di selatan, daerah pegunungan (Lembah Jordan), dan sebagian penduduk tinggal di dataran rendah pantai yaitu dari Haitu ke selatan sampai ke Tel Aviv, wilayah Galilea di utara yang berbukit subur. Kelompok etnis terdiri dari 80% Yahudi, 14.6% muslim, 2.1% Kristen dan lainnya 3.2%.

Israel mempunyai kemajuan teknologi yang menunjang perekonomiannya . impor utama berupa minyak mentah, dan perlengkapan militer. Sedang expornya berupa pemotongan berlian, perlengkapan teknologi tinggi dan produksi pertanian berupa buah and sayuran. Separuh dari jumlah populasi di Israel merupakan masyarakat yang professional dan ilmuan sebagai nilai lebih dari keberhasilan ekonominya.

## **B. Wajah Zionisme Israel**

Harapan bahwa pada suatu saat dapat kembali ke “Tanah yang Dijanjikan” tidak pernah hilang diantara orang Yahudi. Aliran Zionisme telah dipupuk di berbagai pusat pernyebaran di sepanjang sejarah, dan pada abad ke-19 sejumlah orang Yahudi datang ke

<sup>9</sup>Palestina untuk bermukim di Jerussalem, Safed, dan Tiberias. Sebagian dari mereka disebut Yahudi Halukah (amal) dengan dukungan dana dari luar negeri. Kerinduan untuk kembali ke Zion amat kuat diantara orang-orang Yahudi Rusia dan Eropa Timur yang sangat menderita akibat berbagai penganiayaan.

Intensifikasi anti-Semitisme di Rusia dalam dua decade terakhir abad ke-19 menyebabkan berdirinya organisasi Hovevei Zion di Odessa dan koloni Zionis pertama di Palestina (1882), yaitu Rishon Le Zion di Yudea, Zichron Jacob di Samaria dan Rosh Pina di Galilea.

Pada tahun 1880-an berbagai pemukiman lainnya menyusul. Mereka kebanyakan orang Yahudi dari Rusia, Galisea, dan Lithuania. Para hartawan Yahudi di Barat, seperti Baron Edmon de Rotschild, banyak memberi sumbangan kepada para pioneer Yahudi. Asosiasi Kolonisasi Yahudi (ICA) didirikan oleh Baron Maurice de Hirsch yang bertugas membeli tanah di Palestina dan menyediakan alat-alat and modal secukupnya bagi para calon pemukim.

### ***Gerakan Zionis***

Pada tahun 1896 Dr. Theodor Herzl, penduduk asli Budapest dan koresponden Paris untuk Neue Freie Presse di Wina memberikan pembalikan politik bagi Zionisme. Pada tiga puluh enam tahun ia menulis dalam bukunya, *Judenstaat* ( Negara Yahudi), sebagai berikut: “Karakter bangsa kami dalam sejarah sangat terkenal, dan meskipun ada penurunan, penurunan itu terlalu halus untuk menginginkan pelenyapannya”. “Nasionalitas Yahudi sangat jelas, tidak mau, dan tidak boleh dihancurkan”. “Masalah Yahudi

---

<sup>9</sup> George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Third Edition, University Of California At Berkeley. • Alih Bahasa: Asri Djuhur, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Indonesia

merupakan masalah nasional yang hanya dapat dipecahkan dengan membuatnya menjadi masalah Politik Dunia yang harus diperbincangkan dan diselesaikan oleh bangsa-bangsa dunia yang beradab dalam permusyawarahaan”.

Pada tahun 1897 Herzl menerbitkan majalah mingguan Die Welt sebagai sarana resmi bagi polemic Zionisme. Pada tahun yang sama, atas inisiatifnya, Kongres Zionis pertama diselenggarakan di Basel, Swiss. Kongres ini menghasilkan suatu revolusi yang menyebut “tempat bermukim di Palestina” bagi kaum Yahudi dan menciptakan Organisasi Zionis Dunia. Herzl terpilih menjadi ketuanya. Sejak saat itu ia berusaha memperoleh izin dari pemerintah Uthmaniyah untuk mendirikan Maskapai Yahudi bagi persiapan permukiman di Palestina. Karena waktu itu merupakan periode persahabatan Turki-Jerman, ia memohon kepada Kaisar Willem II agar memberi bantuan dalam masalah ini dan mengusulkan agar Maskapai itu dibentuk dan dibawah perlindungan Jerman.

Pada tahun 1903 penganiayaan besar-besaran terhadap orang Yahudi terjadi di Kishinev dan Gomel di Rusia. Ini membuat masalah Yahudi menjadi lebih parah daripada sebelumnya. Herzl berunding dengan pemerintah Inggris dan memperoleh tawaran Uganda sebagai wilayah permukiman mereka. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak dalam Kongres Ketujuh Organisasi Zionis Dunia (1904) yang tidak mengizinkan alternative lain kecuali Palestina.

Pada tahun 1904 Herzl meninggal, tetapi Zionisme terus menarik pengikut yang lebih banyak lagi. Ia segera berubah menjadi gerakan yang kuat dengan dibiayai oleh dana nasional Yahudi (Keren Kayemeth) yang diorganisasi untuk memperoleh tanah di

<sup>10</sup>faksi politik kiri (Poale Zion), kanan (Mizrachi), dan tengah (General Zionist), dan segera menyebar keseluruh hemisfer barat. Di AS, Organisasi Zionis merekrut sejumlah besar anggotanya yang datang dari Eropa Timur akibat peniksaan orang Rusia terhadap kaum Yahudi. Masyarakat yahudi lainnya yang ada di AS, seperti kelompok Sephardi (Spanyol) dan Yahudi Jerman yang lebih makmur, menunjukkan sikap acuh tak acuh atau bermusuhan terhadap Zionisme. Meskipun demikian, ada juga dari mereka yang masuk ke dalam Organisasi Zionis.

Zionis dulu dan kini merupakan gerakan nasional, dan karenanya mendapat tentangan di antara bangsa Yahudi sendiri. Oposisi itu lahir karena beberapa alasan. Kelompok Yahudi ultraorthodoks berkeberatan terhadap aspek politik gerakan itu. Mereka percaya bahwa kembali ke Zion harus merupakan takdir Tuhan, bukan kehendak duniawi. Pandangan demikian dipupuk dari *Agudath Israel*.

Kelompok sosialis (dan kemudian komunis) menganggap Zionisme sebagai gerakan reaksioner kaum borjuis. Para *rabbi* (pendeta) Yahudi dan pengikutnya menentang Zionis juga karena karakter nasionalnya. Karena percaya bahwa Yudaisme adalah agama dan bukan kebangsaan, mereka cenderung menolak konsep politik Zionisme. Di Inggris dua organisasi Yahudi, Badan Perwakilan Yahudi Inggris dan Asosiasi Inggris-Yahudi, menentang Zionisme atas dasar ini. Oposisi mereka semakin lantang selama Perang Dunia I ketika diketahui bahwa Dr. Chaim Weizmann berusaha untuk memperoleh deklarasi resmi pemerintah Inggris yang menyokong Zionisme. Pada 24 Mei 1917 Montefiore dan Alexander, masing-masing Ketua Asosiasi Inggris-Yahudi dan Ketua Dewan Perwakilan, mengumumkan protes terbuka terhadap program Zionis.

dalam *the times*. Dalam tulisan itu mereka menyatakan bahwa politik Zionisme tidak sesuai dengan agama Yahudi dan bahwa ia memperkenalkan konsep tentang:

Suatu kebangsaan Yahudi yang sekular, direkrut atas prinsip ras yang longgar dan tidak jelas serta kekhasan etnografis.

Akan tetapi ini bukan Yahudi dalam arti spriritual sehingga pendiriannya di Palestina akan merupakan penolakan terhadap semua cita-cita dan harapan karena kelangsungan hidup bangsa Yahudi di daerah itu akan menilai hati nurani dan simpati bangsa Yahudi sendiri. Dengan alasan itu, Komite Gabungan Badan Perwakilan dan Asosiasi Inggris-Yahudi mengutuk proposal kebangsaan Zionis.

Protes serupa dikumandangkan di as oleh komisi Yahudi di Amerika pimpinan Jacob H. Schiff, Louis Marshall, serta Mayer Sulzberger. Schiff mengemukakan dalam suatu kesempatan:

*Saya percaya bahwa saya tidak begitu keliru bila saya katakan bahwa antara 50 dan 70 persen dari yang disebut nasionalis Yahudi adalah ateis atau murtad, dan bahwa sebagian besar pemimpin nasionalis Yahudi pasti tidak pernah menaruh minat terhadap agama Yahudi.*

Mayer Sulzberger, mantan Ketua Pengadilan Pembelaan Masyarakat di Pennsylvania, menentang Zionisme dengan dasar ia merupakan penolakan terhadap demokrasi:

Demokrasi, katanya, berarti bahwa masyarakat suatu Negara akan memilih pemerintahnya dan memelihara kekuasaannya.

Mengingat prinsip demikian, suatu konvensi Zionis yang mengharapkan pemerintah di Palestina akan sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang paling sederhana pun. Hal ini tidak bermakna kecuali jika tujuannya ialah menyingkirkan

dengan menggantikannya dengan kemauan pihak yang mungkin pernah atau belum pernah melihat Palestina.

Zionisme bersikeras pada definisi nasional dan sampai tingkat tertentu definisi ras-bangsa Yahudi dari Jewry Dr. Weizmann dalam jawabannya kepada Alexander dan Montefiore menyatakan secara positif:

*Hanyalah masalah kenyataan bahwa Yahudi merupakan bangsa. Besarnya mayoritas mereka yakin bahwa mereka itu adalah bangsa, yang juga diyakini oleh non-Yahudi di semua Negara.*

Selanjutnya pikiran serupa datang dari Hakim Brandeis yang merumuskan definisinya berdasarkan konsep “keturunan”:

*Arti kata Yahudi dalam istilah masalah Yahudi harus diterima sebagai sama luasnya dengan ketidakmampuan memecahkan masalah kita. Bukan Yahudi yang menciptakan ketidakmampuan itu, dan dengan demikian memberikan definisi bagi istilah Yahudi. Ketidakmampuan ini meluas kepada semua keturunan Yahudi. Mereka tidak berakhir dengan penolakan kepercayaan, meskipun tulus. Mereka tidak berakhir dengan penghilangan perangai luar Yahudi, meskipun lengkap. Ketidakmampuan ini tidak berakhir sebelum keturunan Yahudi hilang oleh perkawinan silang yang berulang-ulang yang praktis melenyapkan Yahudi.*

Kutipan dari berbagai tokoh terkemuka Zionis dan anti-Zionis itu menggambarkan terpisahnya masalah Palestina diantara bangsa Yahudi sendiri. H.M. Kallen menyatakan bahwa hal itu merupakan perjuangan diantara “individualisme yang mendukung pembauran (isimilasi) dan nasionalisme yang menghargai diri sendiri”. Perjuangan tersebut menyulitkan Zionis, khususnya Dr. Weizmann di Inggris, tempat keluarga Yahudi terkemuka, Anggota Aristokrasi Inggris, mempunyai kedudukan yang

berpengaruh yang dalam perdagangan dan kehidupan social dan menolak nasionalisme



Yahudi. Namun, dalam deklarasi Balfour mereka memperoleh pengakuan resmi atas pentingnya sebagai jurubicara bagi dunia Yahudi. Deklarasi ini menetapkan babak baru dalam sejarah Yahudi, yaitu membangun rumah nasional di Palestina. Dalam periode baru ini, Zionis mengubah diri sendiri dari misionaris menjadi pembangun Negara. Mereka menyesuaikan diri dengan tugas baru dengan semangat.

### **C. Zionisme dan Pengusiran Warga Palestina**

<sup>11</sup>Kasus pengusiran 415 warga Palestina dari tanah airnya yang diduduki Israel nyaris mendominasi berita Timur Tengah menjelang tutup tahun 1992. seakan-seakan itu sebuah paket khusus dari Pemerintah Israel menyambut berakhirnya tahun 1992. penderitaan mereka semakin lengkap setelah Pemerintah Libanon melarang mereka masuk ke daerah kedaulatannya. Mereka akhirnya terkatung-katung , tidak di Israel, tidak pula di Lebanon. Masyarakat internasional bereaksi keras terhadap tindakan pemerintah Israel itu. Dewan keamanan PBB menurunkan resolusi no. 799 tertanggal 12 Desember 1992, yang menyerukan pemerintah Israel memberi jaminan keamanan bagi kembalinya mereka ke kampung halamannya.

Para Menlu Arab pun, pada pertemuannya di Cairo (Mesir) 24 Desember 1992, mengecam keputusan sewenang-wenang Israel. Meski begitu, Pemerintah Israel tetap tidak mundur dari keputusannya itu. Nasib warga Palestina itu pun menjadi semakin tidak menentu. Tindakan Israel mengusir warga Palestina kali ini sesungguhnya bagian dari rangkaian politik tradisional negeri Yahudi itu. Jauh sebelum berdirinya Negara Israel tahun 1948, para aktivis gerakan Zionisme telah mengusir warga Palestina secara halus lewat cara membeli tanah-tanah mereka dengan harga semahal apapun. Namun soal

<sup>11</sup>Muethafa Abd. Rahman "Dilema Israel Antara Kebijakan Politik dan Perdamaian" Kompas



pengusiran warga Palestina ini makin kompleks dan kian berdimensi politis setelah berdirinya Negara Israel tahun 1948.

### ***1. Pengusiran Warga Palestina***

Pemerintah Israel rupanya tidak cuma secara harfiah mengambil alih politik pengusiran ini, tetapi ia menerapkannya secara lebih terorganisir dan sistematis. Hal ini sebenarnya tak lepas dari pola pemikiran tokoh-tokoh gerakan Zionisme, yang rupanya dengan setia tetap dianut partai-partai di Israel. Theodor Herzl (1860-1904), pendiri gerakan Zionisme mengatakan pada tahun 1895, "Kami akan berusaha sekuat tenaga mengusir orang-orang Arab ke Negara tetangga dan akan menutup pintu masuk dan pekerjaan bagi mereka di negeri kami ini". Ia lalu berseru kepada warga Yahudi, "Kamu sekalian tidak akan menemukan kebahagiaan bila masih ada penduduk selain Yahudi di tanah Palestina".

Pada masa generasi Pasca-Herzl, pola pemikiran semacam ini justru semakin subur. Seorang aktivis Zionisme berkebangsaan Inggris, Mosche Mounuhen, mengatakan, "Wahai umat Yahudi, tancapkanlah di hatimu yang masih ragu bahwa tanah air kita harus disucikan dari kaki orang asing dan harus bersih dari kotoran debu". Seorang pembantu Herzl mengatakan setelah berkunjung ke Palestina tahun 1897, "Siapkanlah jiwa ragamu untuk mengeluarkan kabilah-kabilah Arab dari negeri ini", ia juga pernah mengatakan, mengusir orang Arab adalah suatu keharusan, untuk menempatkan warga Yahudi dari Eropa.

Sejarah berada di pihak Israel. Gerakan Zionis selanjutnya, praktis memang tidak

<sup>12</sup>Israel 1948, mereka justru mendapat angin dari pemerintah proktektorat Inggris di tanah Palestina. Menjelang berdirinya Negara Israel, gerakan Zionis berhasil mengosongkan 60 desa Palestina dari penduduknya yang sebagian besar terletak di bagian utara wilayah Palestina. Aksi pengusiran massal warga Palestina terjadi lagi seusai 3 perang besar Timur Tengah (1948, 1956, 1967). Pemerintah Negara baru Israel, setelah perang 1948, berhasil mengusir dalam jumlah besar penduduk Palestina ke Mesir, Suriah, Yordania, dan Lebanon.

Namun eksodus terbesar terjadi seusai perang 1967. akibat perang enam hari, tidak kurang dari 300.000 penduduk Palestina terusir dari Tepi Barat dan Jalur Gaza menuju Negara-negara Arab lainnya. Pasca perang 1967, pengusiran warga Palestina lebih bersifat individual dan ditujukan pada tokoh-tokoh yang berpengaruh. Hal ini erat kaitanya dengan berdirinya Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tahun 1969. pemerintah pendudukan Israel bertindak keras terhadap tokoh-tokoh Palestina yang diketahui sebagai simpatisan PLO.

Pada bulan juli 1969, pemerintah pendudukan Israel mengusir sembilan tokoh Palestina yang dicurigai sebagai pendukung PLO di daerah pendudukan. Antara lain adalah Haidar Abdel Shafi (ketua delegasi perunding Palestina sekarang), Faisal Husaini dan Ibrahim Abushah. Tokoh Palestina lain yang tercatat pernah kena usir adalah Ketua Dewan Nasional Palestina Sheikh Abdul Hamid Shayeh.

Terbentuknya Front Nasional Palestina pada tahun 1973, yang tak lain berkepanjangan tangan PLO di tanah pendudukan, menyebabkan lebih banyak lagi tokoh-tokoh Palestina yang diusir pemerintah pendudukan. Dari tahun ke tahun, sejak 1967 memang tidak pernah seri ari pengusiran warga Palestina. Pada tahun 1968 tercatat

69 warga Palestina yang diusir, tahun 1969 ada 223, tahun 1970 ada 406, tahun 1971 ada 306, tahun 1972 ada 91, tahun 1973 ada 10, tahun 1974 ada 11, tahun 1975 ada 13, tahun 1976 ada 2, tahun 1977 ada 2, tahun 1978 ada 2 juga orang yang diusir.

Dari tahun 1978 sampai 1985 sekitar 850 warga Palestina terusir. Dan pemerintah Israel, dalam kasus pengusiran itu, tidak pernah mundur dari keputusannya kecuali jika dalam keadaan terpojok betul. Itupun, kalau coba membandingkan, barangkali Cuma satu dari 100 kasus pengusiran.

## **2. Penyalahgunaan UU Darurat**

Menurut versi pemerintah Israel, aksi pengusiran warga Palestina selama ini, didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomer 108 dan 112 pemerintah Proktektorat Inggris di Palestina, yang terus diberlakukan sampai hari ini. Tetap menurut pihak Palestina, pemerintah pendudukan Israel telah menyalahgunakan sedemikian rupa UU Darurat tersebut. Pihak Palestina mengatakan, UU no 108 hanya berbunyi, "Menteri Perthanan dan Hakim Militer berhak mengusir atau mencegah orang masuk Negara". Kenyataannya, seringkali pemerintah pendudukan Israel memberlakukan UU itu pada pejuang-pejuang Palestina penggerak gerakan Intifada,

Sedangkan UU Darurat nomer 112 berbunyi "Seseorang yang diancam hukuman pengusiran, diberi kesempatan meminta konsultan hukum untuk memasalahkan lebih jauh sebab musabab pengusiran itu. Dan terdakwa, selama dalam proses penyelesaian hukum, dimasukan terlebih dahulu ke karantina tahanan". Tetapi pemerintah pendudukan Israel langsung saja main usir, tak memberi kesempatan pada terdakwa menyelesaikan kasusnya secara hukum. Selain itu pemerintah Israel dituduh menyalahi hukum internasional. Antara lain Konvensi Geneva tanggal 12 Agustus 1949 pasal 76 yang



<sup>13</sup>kelompok lain tertentu yang coba mengarahkan kebijakan luar negeri, tapi tak ada lobi yang berupaya sedemikian rupa hingga mengalihkan kepentingan nasional, juga terus menyakinkan rakyat AS bahwa kepentingan Negara mereka dan Negara lain dalam hal ini Israel adalah secara essential serupa. Sejak Perang Oktober 1973, Washington telah memberi dukungan pada Israel hingga ke tingkat yang mengerdilkan jika dibandingkan dengan dukungan terhadap Negara lain. Israel telah menjadi penerima terbesar bantuan langsung ekonomi dan militer sejak tahun 1976, sekaligus merupakan yang terbesar secara keseluruhan sejak Perang Dunia II, hingga 140 triliun Dollar AS (dengan nilai Dollar tahun 2004). Israel menerima kira-kira 3 trilliun dollar AS bantuan langsung setiap tahunnya.

Dalam hitungan kasar, jumlah tersebut merupakan lima dari anggaran untuk bantuan luar negeri, atau secara denga 500 dollar AS per tahun bagi setiap penduduk Israel. Jumlah itu tentu mengejutkan mengingat Israel adalah Negara industri yang makmur dengan pendapatan per kapita setara Korea Selatan dan Spanyol.

Penerima bantuan lainnya mendapatkan dana berupa seperempat cicilan, tapi Israel menerima keseluruhan dana pada awal tiap tahun fiscal dan itu berarti Israel juga mendapatkan bunganya. Sebagian besar Negara penerima bantuan militer diminta untuk menggunakan bantuan tersebut di AS, tetapi Israel diizinkan untuk menggunakan kira-kira 25% dari bantuan yang dialokasikan untuk mensubsidi industri pertahannya sendiri. Israel adalah satu-satunya penerima bantuan yang tidak perlu melaporkan untuk apa dana tersebut digunakan, yang karenanya menjadi tidak mungkin untuk mencegah uang tersebut digunakan demi sesuatu yang ditentang sendiri oleh AS, seperti pembangunan

---

<sup>13</sup> <http://www.nytimes.com/1998/05/15/international/middleeast/15israel.html>

pemukiman di Tepi Barat. Selain itu, AS juga memberi Israel hampir 3 triliun dollar AS untuk mengembangkan system persenjataan dan juga akses ke persenjataan rahasia seperti helicopter *Blackhawk* dan jet *F-16*.

AS juga memberi Israel akses intelejen yang disangkal Israel ke sekutu NATOnya dan juga menutup mata terhadap kepemilikan senjata nuklir oleh Israel. Washington juga memberi dukungan diplomatic secara konsisten terhadap Israel. Sejak 1982, AS sudah 32 kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyinggung Israel lebih dari jumlah keseluruhan veto yang dikeluarkan anggota Dewan Keamanan yang lain. Itulah yang menghalangi Negara-negara Arab untuk menyeret persoalan nuklir Israel masuk ke agenda IAEA. AS selalu membantu Israel pada saat perang dan berada di pihak Israel dalam negosiasi damai.

Salah seorang partisipan Camp David pada tahun 2000 mengatakan "sudah terlalu sering, kita berfungsi.....sebagai pengacara Israel". Akhirnya, ambisi pemerintah Bush untuk mentransformasi Timur Tengah hanyalah memberi dukungan pada Israel saat situasi genting. Melindungi Israel tidaklah murah, selain menyulitkan Amerika dan Dunia Arab. Sebagai contoh, keputusan untuk memberi bantuan darurat militer sebesar 2,2 trillium dollar AS selama Perang Oktober 1973 memicu embargo minyak OPEC yang mengakibatkan kerusakan cukup berarti bagi ekonomi Negara-negara Barat.

Pada kasus itu, angkatan bersenjata AS tidak memosisikan diri untuk melindungi kepentingan AS di kawasan tersebut. AS juga tak dapat mengandalkan Israel saat revolusi Iran tahun 1979 yang menaikkan perhatian AS pada keamanan suplai

... dan ... AS ... Camp David Development Forum (1)



<sup>14</sup>Awal tahun 1990-an dan lebih-lebih setelah 9/11, dukungan AS dijadikan pembenaran dengan dalih yang menyatakan bahwa kedua Negara ini (AS dan Israel) terancam oleh kelompok-kelompok teroris yang berasal dari Negara-negara Arab dan Muslim. “Negara-negara Bajingan” melindungi kelompok-kelompok ini dan mengembangkan senjata pemusnah massal. Ini berarti Washington tidak hanya harus membiarkan Israel menghadapi Palestina, dan tidak menekan Israel untuk membuat konsensi, hingga seluruh teroris Palestina dipenjara atau mati, tetapi juga AS seharusnya menyerang Negara-negara seperti Iran dan Syria. Dengan demikian Israel dipandang sebagai sekutu utama dalam perang melawan terror, karena musuh Israel adalah musuh Amerika. Pada kenyataannya, Israel bertanggung jawab dalam perang melawan terror serta melebarnya permasalahan dengan “Negara-negara Bajingan”.

Yahudi Amerika juga berbeda dalam memandang kebijakan menentu Israel. Banyak organisasi kunci di Lobi, seperti *American Israel Lobby Public Affair Comittee (AIPAC)* dan *Conference of Presidents Major Jewish Organisations*, yang dikendalikan oleh tokoh garis keras yang secara umum mendukung kebijakan ekspansi Partai Likud, termasuk penentangan partai tersebut terhadap perjanjian damai Oslo. Sememntara itu bagian terbesar dari yahudi Amerika lebih condong untuk membuat konsensi dengan rakyat Palestina, dan beberapa kelompok seperti *Jewish Voice For Peace* mendukung habis-habisan langkah ini. Meski berbeda, keduanya selalu memberi dukungan yang berguna untuk Israel.

Ada dugaan kuat siapa pun yang melawan dengan mengkritik kebijakan dan

10 | *Journal of Islamic Studies* | Edisi Desember 2014 | Jilid 10 Nomor 1 | [www.ijis.com](http://www.ijis.com)



pernah dituduh “Berkhianat” ketika ia menulis surat kepada Presiden Bush pada pertengahan 2003 yang mendesaknya untuk membujuk Israel menghentikan pembangunan “pagar keamanan” yang kontroversial itu. Para pengkritik mengatakan: “sangat memalukan bila ketua Kongres Yahudi Dunia melobi Presiden AS untuk menghambat kebijakan yang telah diputuskan Pemerintah Israel”.

Pilar kunci dari efektifitas Lobi Israel adalah pengaruhnya dari Kongres AS, dimana Israel teramat jelas kebal terhadap kritik. Ini luar biasa, karena kongres jarang menjauhkan dari perdebatan. Begitu Israel disinggung, para jago kritik di Kongres AS langsung terdiam. Salah satu alasannya adalah beberapa anggota kunci adalah Zionis Kristen seperti Dick Armey, yang pada September 2002 pernah berkata, “Prioritas nomor satu saya dalam kebijakan luar negeri adalah melindungi Israel”.

Sumber lain kekuatan lobi Israel adalah menggunakan aktivis-aktivis kelompok pro Israel. Sebagaimana Morris Amitay, mantan pemimpin AIPAC, pernah mengakui, “ada banyak orang yang bekerja di berbagai level disini di Capitol Hill, yang terlahir sebagai Yahudi, yang selalu memandang suatu isu dengan jiwa Keyahudian mereka...Orang inilah yang berada dalam posisi membuat keputusan untuk senator-senator tersebut. Anda dapat mengandalkan mereka walau mereka hanya di jajaran staf.”

#### **E. Palestina dan Upaya Penyelesaian Melalui Dokumen Stockholm**

Perundingan Israel Palestina yang kini beralih dari Stockholm ke Israel, dilukiskan saat ini telah memasuki masa yang menentukan. Bahkan Presiden Bill Clinton dan PM Ehud Barak usai pertemuan puncak di Lisabon (Portugal), Kamis 1 Juni 2000, menyebut kesepakatan akhir Israel Palestina sudah berada di depan mata. Maka Presiden

Bill Clinton memutuskan menunjuk Moshe Mazar, mantan Menteri Luar Negeri Israel, sebagai

menemui PM Ehud Barak, Presiden Yasser Arafat dan Presiden Mesir Hosni Mubarak guna menyelesaikan sisa-sisa masalah yang masih menggantung.

Kesepakatan akhir Israel Palestina yang disebut berada di depan mata itu adalah hasil perundingan rahasia Israel dan Palestina selama sembilan putaran. Pada putaran kesepuluh, perundingan rahasia tersebut di pindah ke Stockholm untuk menghindari pengaruh suhu politik domestic serta jauh dari jangkauan liputan media massa.

<sup>15</sup>Perundingan rahasia di Stockholm yang dipimpin oleh ketua parlemen Palestina Ahmed Qurei dan menteri urusan Keamanan Dalam Negeri Israel Shlomo Ben Ami, ternyata berhasil menemukan draft sementara formula penyelesaian akhir Israel-Palestina yang keputusan terakhirnya hanya menunggu keputusan politik dari PM Barak dan Presiden Yasser Arafat. Draft sementara yang disebut Dokumen Stockholm itu mencakup masalah kota Jerussalem, pengungsi Palestina dan Negara Palestina. Isi Draft sementara itu garis besarnya adalah:

1. Menyangkut kota Jerussalem: (a) Jerussalem tetap tidak terbagi lagi dan menjadi ibukota Negara Israel. Namun, akan dibentuk lagi lembaga walikota di Jerussalem Barat dan Timur. Lembaga walikota di Jerussalem Timur memiliki hak otonomi. Sektor sipil di Jerussalem Timur seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur kota akan dikuasai Palestina; (b) Bendera Palestina akan dikibarkan di Masjid Al-Aqsho; (c) status tempat-tempat suci Kristiani di Jerussalem Timur akan dirundingkan lagi antara Israel, Palestina dan Vatikan.
2. Menyangkut pengungsi Palestina: (a) pengungsi tahun 1948. Israel pada prinsipnya setuju menampung 100.000 pengungsi Palestina tahun 1948 dalam jangka waktu sepuluh tahun, khususnya yang berada di Lebanon. Pengungsi 1948

itu dibagi dalam 3 kategori. *Pertama*, pengungsi yang bisa kembali ke Israel dan Palestina. *Kedua*, pengungsi yang akan ditempatkan abadi di Lebanon dan menjadi warga negara Lebanon. *Ketiga*, pengungsi yang akan ditempatkan di Negara Arab lain. (b), Soal pengungsi tahun 1967. pengungsi tahun 1967 terbagi juga dalam tiga bagian. *Pertama*, mereka yang mengungsi sebelum tahun 1967 tidak dapat kembali lagi ke Palestina. *Kedua*, mereka yang mengungsi antara bulan Juni dan September 1967, bisa kembali lagi ke Palestina. Jumlah mereka itu, yang diperkirakan sekitar 300.000, akan dipulangkan secara bertahap selama sepuluh tahun. *Ketiga*, mereka yang mengungsi setelah bulan September 1967, tidak bisa kembali lagi; (c) Akan digelar Konferensi Internasional untuk membahas pendanaan dan ganti rugi bagi para pengungsi Palestina yang akan ditempatkan di luar Negara Arab.

3. Tentang Negara Palestina. Israel bersedia mengakui Negara Palestina merdeka sebagai bagian dari kesepakatan final kedua belah pihak. Wilayah Negara Palestina yang akan disetujui Israel tersebut hanya akan menguasai wilayah: (a) 66% wilayah Tepi Barat yang terbagi dalam tiga kantong dan 90% wilayah Jalur Gaza; (b) 14% wilayah Tepi Barat akan disewakan kepada Israel selama 99 tahun; (c) 20% wilayah Tepi Barat akan dianeksasi oleh Israel.

Ada dua kemungkinan sikap Palestina atas rancangan formula penyelesaian akhir tersebut. *Pertama*, menerima penuh atau dengan perubahan kecil tanpa menyentuh substansi. Jika sikap ini yang diambil Palestina, maka Presiden AS Bill Clinton akan mengadakan pertemuan puncak yang melibatkan Presiden Clinton sendiri, PM Ehud

<sup>16</sup>Barak, Presiden Yasser Arafat, Presiden Hosni Mubarak dan Raja Abdullah II dari Jordania untuk memaklumkan deklarasi prinsip penyelesaian akhir menyeluruh Israel-Palestina. *Kedua*, Palestina menolak rancangan formula penyelesaian menyangkut kota Jerussalem dan pengungsi. Bila sikap ini yang diambil Palestina, maka Preside AS Bill Clinton akan mengundang PM Barak dan Presiden Yasser Arafat ke Washington, kemudian mengumumkan penyelesaian akhir Israel-Palestina dengan menunda masalah Jerussalem dan pengungsi Palestina.

Isu adanya formula penyelesaian konflik Israel-Palestina itu sudah beredar luas di Israel dan Palestina. Maka, ekstremis Yahudi mulai mengancam akan membunuh PM Ehud Barak. Sementara elite Palestina menuntut formula penyelesaian akhir Israel-Palestina itu, harus diajukan pada forum referendum rakyat.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 171-172

10 Januari, Presiden Yasser Arafat, Presiden Israel Itzhak Mordechai dan Raja Abdullah II dari  
Jordania untuk mempromosikan dialog damai yang akan membawa kepada penyelesaian  
Palestina. Arafat, Presiden Israel Itzhak Mordechai dan Raja Abdullah II dari Jordania  
kemudian akan berangkat ke Washington, DC pada 12 Januari. Mereka akan bertemu  
dengan Presiden Bush dan Wakil Presiden Cheney pada 13 Januari. Mereka akan  
kemudian berangkat ke Yerusalem pada 14 Januari. Mereka akan bertemu dengan  
Presiden Perancis Jacques Chirac pada 15 Januari. Mereka akan berangkat ke  
Paris pada 16 Januari. Mereka akan bertemu dengan Presiden Jerman Gerhard Schröder  
pada 17 Januari. Mereka akan berangkat ke Berlin pada 18 Januari. Mereka akan  
bertemu dengan Presiden Spanyol José María Aznar pada 19 Januari. Mereka akan  
bertemu dengan Presiden Portugal António Guterres pada 20 Januari. Mereka akan  
bertemu dengan Presiden Yunani Kostas Karamanlis pada 21 Januari. Mereka akan  
bertemu dengan Presiden Turki Abdullah Gül pada 22 Januari. Mereka akan  
bertemu dengan Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev pada 23 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Uzbekistan Islam Karimov pada 24 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Kyrgyzstan Askar Akayev pada 25 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Tajikistan Emomali Rahmonov pada 26 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Turkmenistan Saparmyrat Niyozov pada 27 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pada 28 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Georgia Eduard Shevardnadze pada 29 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Armenia Robert Kocharyan pada 30 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev pada 31 Januari.

10 Januari, Presiden Yasser Arafat, Presiden Israel Itzhak Mordechai dan Raja Abdullah II dari  
Jordania untuk mempromosikan dialog damai yang akan membawa kepada penyelesaian  
Palestina. Arafat, Presiden Israel Itzhak Mordechai dan Raja Abdullah II dari Jordania  
kemudian akan berangkat ke Washington, DC pada 12 Januari. Mereka akan  
kemudian berangkat ke Yerusalem pada 14 Januari. Mereka akan bertemu dengan  
Presiden Perancis Jacques Chirac pada 15 Januari. Mereka akan berangkat ke  
Paris pada 16 Januari. Mereka akan bertemu dengan Presiden Jerman Gerhard Schröder  
pada 17 Januari. Mereka akan berangkat ke Berlin pada 18 Januari. Mereka akan  
bertemu dengan Presiden Spanyol José María Aznar pada 19 Januari. Mereka akan  
bertemu dengan Presiden Portugal António Guterres pada 20 Januari. Mereka akan  
bertemu dengan Presiden Yunani Kostas Karamanlis pada 21 Januari. Mereka akan  
bertemu dengan Presiden Turki Abdullah Gül pada 22 Januari. Mereka akan  
bertemu dengan Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev pada 23 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Uzbekistan Islam Karimov pada 24 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Kyrgyzstan Askar Akayev pada 25 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Tajikistan Emomali Rahmonov pada 26 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Turkmenistan Saparmyrat Niyozov pada 27 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pada 28 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Georgia Eduard Shevardnadze pada 29 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Armenia Robert Kocharyan pada 30 Januari. Mereka  
akan bertemu dengan Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev pada 31 Januari.

10 Januari 2001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Konflik yang terjadi di Timur-Tengah dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Konflik Intra Arab dan Konflik Arab vs Non-Arab. Untuk konflik pertama (Intra Arab), konflik ini lebih kepada dua faktor yang bertentangan yang terjadi pada tubuh arab sendiri seperti dari dimensi religio-ideologis (Lebanon), dari dimensi politiko-strategis (kelompok “modarat” vs Kelompok “radikal”), serta konflik yang didasari oleh sosial-ekonomi yang bersumber dari jurang pemisah antara kaya-miskin (konflik Irak-Kwait). Sedangkan untuk konflik Arab vs Non-Arab (seperti Irak-Iran, Irak-Suku Kurdi, Israel-Palestina), dan konflik ini bisa ditemui di semua dimensi. Dan yang menarik dari persoalan ini adalah Arab hampir tidak berhasil mengalahkan pihak non arab, khususnya pada kasus Israel-Palestina ini dari sini dapat dilihat bahwa kelemahan dari tubuh arab itu sendiri adalah sulitnya menggalang persatuan umat muslim itu sendiri.

Keterlibatan AS dalam upaya perdamaian Israel-Palestina dalam perundingan kedua Negara tersebut dari awal KTT Camp David I (1978) hingga KTT Camp David II (2000). Masa jeda peredaman konflik dan optimisme perdamaian akhir tahun 2000 mengalami stagnasi lagi. Dalam pelaksanaannya, Israel cenderung menarik waktu dalam merealisasikan komitmen perjanjian yang ada. Kegagalan KTT Camp David II dan meletupnya intifadah Al-Aqsa sejak 28 september 2000.

Situasi Camp David I memang berbeda dengan Camp David II. Misi Presiden

Camp David I lebih dikatakan jauh lebih mudah lantaran Presiden Anwar

Sadat dan PM Manachem Begin sudah lebih dahulu menjembatani hamper 90% isu yang menjadi perbedaan pendapat saat itu.

Disamping itu, PM Begin merupakan perdana menteri yang kuat dengan pemerintah yang utuh. Berbeda dengan PM Barak saat ini yang tampil lemah dengan pemerintah yang rapuh dan amburadul. Meski demikian, Presiden Sadat dan PM Begin butuh tinggal selama 13 hari di Camp David untuk menyelesaikan sisa masalah waktu itu.

## **B. LATAR BELAKANG MASALAH**

<sup>1</sup>Dalam perjalanannya (Palestina) menuju kearah penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah, segala cara telah ditempuh antara kedua belah pihak (Israel-Palestina) namun sampai saat ini pun masih belum terlalu jauh menemukan penyelesaian / kesepakatan yang biasa dikatakan “memuaskan”. Baik itu dipihak Palestina ataupun di pihak Israel.

Teologi merupakan penyulut dari konflik di tanah Al Quds (Kota Jerussalem), yang di klim sebagai kota suci mereka masing-masing. Hal ini dikarenakan di tempat tersebut terdapat tiga pusat ajaran agama besar (Islam, Kristen, serta Yahudi) sehingga tempat tersebut banyak dikunjungi umat beragama dari berbagai pelosok Negeri.

Dalam konflik yang berkepanjangan tersebut banyak pihak-pihak/Negara-negara yang peduli ikut ambil bagian dalam konflik ini (Israel-Palestina) demi terciptanya kedamaian dan keamanan disana. Segala cara dan perundingan telah di lakukan agar terhindarnya pertumpahan darah lagi di tanah Al Quds tersebut-dalam satu dekade terakhir-seperti Konfrensi Madrid tahun 1991, Kesepakatan Oslo 1993, Kesepakatan

---

<sup>1</sup> [Http : // www. Infopalestina.com/statistic,17/09/07](http://www.infopalestina.com/statistic,17/09/07)

[Http : // www. Us-israel.org/jsource/politics/basiclawjerusalem.htm,17/09/07](http://www.us-israel.org/jsource/politics/basiclawjerusalem.htm,17/09/07)

Chalab Muhammad Mubrin. *Dalastina : Sejarah Perkembangan dan Kontroversi Iskarta : Camp Iacari*



Cairo tahun 1994, Kesepakatan Taba 1995, Kesepakatan Hebron tahun 1997, Kesepakatan Wye River tahun 1998, dan Kesepakatan Sharm AL Sheikh tahun 1999, dan di babak millennium baru Konfrensi Damai Timur Tengah Camp David II yang dipelopori kembali oleh Amerika Serikat yang saat itu dipimpin Persiden Bill Clinton yang di gelar pada tanggal 11 Juli 2000 d tempat yang sama. (sebelumnya Camp David I pada tahun 1978 yang dipelopori Presiden Amerika Jimmy Carter) yang mengalami kegagalan dan berdampak terhadap meletusnya Intifadah kedua yang dikenal dengan *Intifadah Al Aqsa* pada 28 September 2000.

Terlebih lagi dalam perkembangan proses perdamaian di Palestina tersebut, semua tidak dapat terlepas dari campur tangan Amerika Serikat (sebagai Negara yang memiliki pengaruh besar), dimana dalam perundingan-perundingan mengenai konflik di Palestina ini Amerika selalu menjadi penengah dan bahkan sebagai negara yang selalu menawarkan draft-draft perdamaian disana.

Yang menjadi pertanyaan disini, apakah semua itu (perundingan-perundingan yang dipelopori oleh Amerika) terlepas dari unsur *persaudaraan* yang mengandung unsur dikte, konspirasi, atau adanya unsure manipulasi sejarah terhadap proses perdamaian di tanah Palestina tersebut. Yang kita sebut sebagai *Tanah Tiga Tuhan* karena perdamaian yang sulit sekali dicapai dari kedua belah pihak (Israel-Palestina).

Oleh sebab itu, banyak sekali dugaan-dugaan dari berbagai kalangan yang mengatakan perdamaian disana tidak lepas dari sekenario Amerika yang membela Israel dan menginginkan konflik tetap ada disana, Amerika yang pandai memutar balikan fakta (dibantu dengan semua *sumber dayanya*), ditambah lagi dengan *lobi-lobi Israel* yang terkenal sulit di kalahkan. Maka Amerika pun menciptakan imaj bahwa semua ini

(konflik serta kekerasan disana adalah disebabkan oleh Islam, baik itu fundamentalisme, terorisme, sampai ke jihad).

Memang, pasca KTT Camp David II Negara-negara Internasional masih mengupayakan terciptanya perdamaian di tanah Palestina itu. Baik dari Negara-negara Islam maupun Amerika yang juga ikut ambil bagian. Negara-negara Internasional yang terlibat langsung proses perdamaian Timur-Tengah tidak tinggal diam. Mereka tahu konsekuensi dari kegagalan perundingan tersebut yang akan berimbas pada perdamaian di tanah Palestina kelak (Intifadah Al Aqsa contohnya).

Seperti Negara-negara Arab yang tergabung dalam Komite Jerusalem (*Al Quds*) Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan 16 negara Islam-termasuk Indonesia-hari senin 28 Agustus 2000 di Maroko menggelar sidang putaran ke-18 membahas masalah status kota Jerussalem. Yang kemudian akan dilanjutkan di Doha pada November 2000.

Banyak kalangan beranggapan bahwa proses damai di Palestina tersebut akan sulit di capai, selama pihak-pihak yang bertikai terus mengklaim hak-hak mereka terhadap tanah Jerusalem tersebut. Memang kesulitan yang utama dihadapi dari perundingan-perundingan tersebut menemui jalan buntu pada saat permasalahan sudah menyangkut teologi, status ataupun hak tanah Jerussalem. Perundingan-perundingan tersebut hanya merupakan sebatas media atau sarana menuju perdamaian yang di kehendaki, namun itu semua kembali kepada pihak-pihak yang bertikai.

Sesungguhnya berita kegagalan KTT Camp David II hari selasa 25 Juli 2000, bukan suatu hal yang mengejutkan. Bahkan menjelang KTT itu sendiri, hamper semua

yang paling mungkin terjadi. Pasalnya, Israel dan Palestina sejak awal sudah berbeda secara mendalam dalam filosofi dan ideology menyangkut isu-isu status final yang pada gilirannya mempengaruhi pada cara pandang menyelesaikan isu tersebut.

Dalam draft perdamaian tersebut, Ehud barak mempertahankan status quo di jalur Gaza dan Tepi Barat yang dikemas dalam bungkus kebijakan lima garis merah yang terkenal itu. Intinya adalah Ibu Kota Jerussalem yang bersatu dan abadi, Pemukiman Yahudi dibawah kedaulatan Israel, tidak ada militer di Tepi Barat, tidak mengakui hak pulang bangsa Palestina, dan tidak kembali pada perbatasan tahun 1967. sementara Amerika secara implicit mendukung kebijakan PM Barak tersebut.

Sebaliknya Yasser Arafat berjuang mengembalikan hak-hak rakyat Palestina dengan menggunakan senjata resolusi PBB, semacam Resolusi No.242, No.338, dan No.194. Tak pelak lagi, terjadilah benturan keras Israel dan Palestina di arena perundingan, mengingat kontradiksi antara resolusi PBB dan garis merah versi Ehud Barak tersebut. KTT Camp David II selama 15 hari itu ternyata tidak mampu melenturkan jarak kontradiksi tersebut.

Kegagalan dari perundingan Camp David II membuat kecewa beberapa kalangan yang telah mendukung untuk terciptnya perdamaian kedua Negara tersebut<sup>2</sup>. Karena itu, yang disadari oleh semua pihak, Barak dan Arafat harus berhasil mencapai kesepakatan final atas semua isu tanpa kecuali dalam waktu yang singkat ini. Karena kalau pemahaman itu yang dianut, maka KTT itu sendiri merupakan problema yang lebih besar dari problema yang ada sebelumnya.

Rasanya, model KTT Geneva antara Presiden AS Bill Clinton dan Alm. Presiden Suriah Hafez Assad bulan maret 2000 yang gagal itu merupakan contoh yang dapat

---

<sup>2</sup> Bahman Mustakafa Abdul "Isiah Isiah Isiah Palestina" Jakarta: Kompas, 2002, 1

dilihat serupa atas KTT Camp David II sekarang. Artinya kegagalan KTT Camp David II bukan segala-galanya, karena KTT itu hanya bagian dari usaha terus menerus dalam menggerakkan proses perdamaian Timur Tengah.

Kendala utama KTT Camp David itu terletak pada isu Kota Jerussalem, khususnya Kota Lama yang hanya memiliki satu kilometer persegi tetapi memiliki tempat suci bagi tiap agama samawi, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Dan, untuk pertama kalinya sejak tahun 1967, Israel dan Palestina terlibat konflik terbuka di meja perundingan soal kota suci tersebut. Palestina memegang teguh hak hukum, histories dan demografis di Jerusalem Timur. Sedangkan Israel mengandalkan kekuatan di lapangan. Inisiatif kompromi yang diajukan AS menyangkut kota suci itu ternyata tidak jauh dari sikap Israel, yaitu hanya memberi Palestina otonomi luas di Jerussalem Timur dan semacam kedaulatan agama di tempat suci agama Kristen dan Islam di Old City. Sedang kedaulatan politik, tetap di pegang Israel. Inisiatif tersebut ditolak mentah-mentah oleh Yasser Arafat, di mana Palestina tetap menuntut kedaulatan penuh di Jerussalem Timur.

Bagi Clinton, gagalnya KTT Camp David adalah hilangnya momentum sejarah untuk membuat prestasi besar, sebelum ia meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2001. Bagi Barak KTT itu merupakan inisiatifnya. Adalah Barak yang paling getol meminta agar KTT segera digelar, sehingga ia berani mengorbankan keutuhan koalisi pemerintahannya demi KTT itu (setelah mundurnya Partai Nasional Agama, Yisrael

DAFTAR PUSTAKA  
1. David Mervin, *Perundingan Camp David*

Karena itu, ketika KTT Camp David dinyatakan gagal mencapai kesepakatan pelh Presiden Clinton, segera diisyaratkan pula akan digelar KTT lanjutan dalam waktu yang akan ditentukan kemudian. Menlu Albright dan utusan khusus AS Dennis Ross akan mengunjungi Timur Tengah lagi beberapa pekan mendatang untuk membahas KTT lanjutan itu. Alhasil, Presiden Clinton dan PM Barak tampak lebih berkepentingan dengan KTT saat ini daripada Yasser Arafat.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka topik permasalahan yang akan dicoba dianalisa dalam penelitian ini adalah mengenai:

**“Mengapa Upaya Perundingan Camp David II (2000) gagal mencapai Kesepakatan Final konflik Israel Palestina”**

### **D. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN .**

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang kita hadapi dalam Hubungan Internasional diperlukan teori yang relevan atau teori yang berhubungan dengan suatu permasalahan tersebut Pada penelitian ini penulis mengacu pada suatu teori yaitu Teori

## Teori Negosiasi

<sup>3</sup> Didalam suatu persetujuan Israel Palestina, telah diupayakan berbagai jalan perundingan untuk mencapai perdamaian termasuk dalam perundingan tersebut adalah Camp David II. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi demi tercapainya suatu negosiasi, seperti yang telah diterjemahkan sebagai berikut:

*“ Harus ada dua elemen didalam negosiasi: harus ada persamaan kepentingan dan isu-isu konflik. Tanpa kesamaan kepentingan tidak ada yang dinegosiasikan, tanpa isu-isu konflik juga tidak ada yang dinegosiasikan ”.*

Diakui secara luas bahwa salah satu fungsi utama diplomasi adalah negosiasi. Berbagai upaya perdamaian melalui perundingan-perundingan telah di gelar salah satunya perundingan Camp David II, namun perdamaian masih juga belum terwujud. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak tercapainya suatu negosiasi dalam perundingan tersebut. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai mencari cara untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik mereka. Sedangkan Herbert C. Kelman mengatakan bahwa keberhasilan suatu perundingan (*negosiasi*) akan dipengaruhi oleh beberapa factor.

---

<sup>3</sup> Fred C. Ikle “Negotiation” dalam Craig dan George, *Introduction to International Politics*, Prentice Hall, 1980, Hal.57

S.L. Roy, *Diplomasi*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 17

H. Miall, O Ramsbotham, dan T. Woodhouse, *Resolusi Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, Mencegah, Mencegah dan Mengakhiri Konflik*. Ransumbar Politik Sosial, Agama dan Pas. teri Tri Budhi Satrio, Jakarta

<sup>4</sup>*Pertama* prinsip dan pragmatis (*Principle and Pragmatism*), artinya sebelum memasuki perundingan, pihak-pihak yang berunding harus telah sepakat terlebih dahulu mengenai hal-hal prinsip yang menjadi sengketa. Untuk mencapai kesepakatan maka diperlukan komitmen dan tanggung jawab moral untuk saling menerima dan memberi prinsip-prinsip yang mereka sengketa secara timbal balik. Inti dari komitmen ini berkaitan dengan dimensi moral dari pihak-pihak yang bersengketa untuk bersedia berunding dan mentaati hasil perundingan. Sebelum ada kesepakatan maka belum terdapat momentum yang tepat bagi kedua belah pihak melakukan perundingan.

Sedangkan pragmatisme sebagai prasyarat tercapainya perdamaian, atau menurut Kelman “ *Pragmatism is a sine qua non for a mutually acceptable peace*”, artinya perundingan ini harus pragmatis atau mudah untuk dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga terwujud suatu perdamaian.

Terdapat tiga tipe pragmatisme yang akan memegang peranan dalam proses perundingan perdamaian. *Pertama*, adanya keterpaksaan tekanan (*Compulsion*) yang membuat pihak yang bersengketa bersedia berunding. Kondisi ini dapat menciptakan momentum yang tepat untuk melakukan perundingan.

*Kedua*, pragmatisme yang dilandasi adanya jaminan masa depan yang lebih baik (*Vision of Future*), yang artinya suatu perundingan dianggap pragmatis apabila

---

<sup>4</sup> Siti Mutiah, “Hambatan Pelaksanaan Deklarasi Prinsip-prinsip sebagai Resolusi Konflik Palestina-”



memenuhi adanya jaminan masa depan yang lebih baik lagi bagi kedua belah pihak dalam masa datang meskipun mereka harus lebih dahulu mengorbankan sesuatu.

*Ketiga*, pragmatisme dilandasi adanya kepentingan (*interest*) yang berarti bahwa suatu perundingan akan bisa sukses dan mudah diimplementasikan, apabila masing-masing pihak sama-sama memiliki suatu kepentingan untuk memecah status quo yang menghalangi karena keadaan status quo berdampak membahayakan kedua pihak sehingga perlu dirubah, walaupun factor kepentingan sebagai syarat akan keberhasilan sebuah perundingan, tetapi terkadang bisa juga menjadi penghambat perundingan karena terbentur oleh perbedaan kepentingan yang mendasar.

Keberhasilan suatu perundingan harus adanya komitmen untuk saling mengakui eksistensi masing-masing (*acknowledgment*). Pengakuan eksistensi kebangsaan atau Negara masing-masing akan dapat menjembatani hal-hal yang tidak pasti diluar inti yang menjadi sengketa mereka. Untuk itu syarat pengakuan tersebut haruslah timbal balik (*reciprocal*). Artinya kedua belah pihak ini mempunyai komitmen untuk saling mengakui, berkaitan masalah prinsip yang mereka sengkatakan.

Berdasarkan teori diatas, yang dilakukan Israel dan Palestina dalam menentukan nasib negaranya melalui Negosiasi. Hal ini bedasarkan pada kebanyakan peristiwa atau momentum yang ada diselesaikan melalui jalan suatu perundingan perdamaian. Karena suatu pertentangan atau konflik lebih banyak berakhir di suatu negosiasi perjanjian atau perundingan perdamaian yang bersama

## **E. TUJUAN PENELITIAN**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk memberi gambaran yang obyektif tentang beberapa formula perdamaian yang telah dilakukan kedua belah pihak yaitu Israel-Palestina.
2. Untuk memberi gambaran tentang proses perdamaian kedua Negara tersebut dengan menggunakan Perundingan Camp David II dan mengapa mengalami kegagalan.
3. Sebagai syarat untuk memenuhi gelar keserjanaan S-1 pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **F. HIPOTESA**

Berdasarkan dari penjabaran permasalahan diatas, maka penulis merumuskan bahwa upaya perundingan Camp David II gagal direalisasikan atau diwujudkan karena:

1. Adanya kepincangan dalam upaya perundingan Camp David II yang lebih memihak kepada Israel
2. Tidak adanya jaminan masa depan yang lebih baik kepada rakyat Palestina yang menyebabkan gagalnya upaya perundingan tersebut

## **G. TEHNIK PENGUMPULAN DATA**

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan fenomena dan peristiwa yang diketahui melalui data dari studi pustaka. Data diolah melalui atau bersumber dari literature-literatur, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, majalah-majalah, surat kabar, dan multimedia.

## **H. JANGKAUAN PENELITIAN**

Wilayah kajian skripsi ini secara umum merupakan analisa yang menggambarkan peristiwa diplomasi yang terjadi dari perkembangan yang ada selama ini mengenai konflik Israel Palestina dan difokuskan pada suatu perundingan Camp David II yang merupakan suatu perundingan yang terjadi pada tahun 2000 dan dimana perundingan tersebut tidak membuahkan hasil yang lebih baik terhadap kedua Negara tersebut atau bisa dikatakan gagal dan setelah perundingan tersebut tidak ada lagi formula perdamaian yang telah dilakukan oleh kedua Negara tersebut hingga tahun ini yang menyebabkan adanya ketidakpastian tentang kapan berakhirnya perang tersebut. Cakupan pembahasan dan pengambilan data difokuskan pada formula perdamaian yang telah dicapai oleh kedua Negara tersebut yaitu Israel Palestina khususnya pada perjanjian Camp David II (2000) yang tidak berhasil menyelesaikan konflik tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan mengambil diluar decade tersebut, sepanjang dianggap penting dan relevan